



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI KERJA SAMA
EKONOMI DAN TEKNIK (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF
THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT ON ECONOMIC AND
TECHNICAL COOPERATION*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 4 April 2007 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Arab Mesir mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Arab Republic of Egypt on Economic and Technical Cooperation*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Arab Mesir mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Arab Republic of Egypt on Economic and Technical Cooperation*) yang telah ditandatangani pada tanggal 4 April 2007 di Jakarta, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juni 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juni 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Putra Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,



Bistok Simbolon

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR
MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir, selanjutnya disebut sebagai Para Pihak;

BERKEINGINAN UNTUK memperluas dan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara di bidang Ekonomi dan Teknik jangka panjang dan berkelanjutan;

MEYAKINI perlunya kerjasama yang efektif dan berkelanjutan sesuai dengan kepentingan kedua negara;

MENIMBANG pentingnya mendirikan sebuah mekanisme untuk menindaklanjuti proyek-proyek dan proposal kerjasama yang telah disepakati oleh kedua negara;

MENEGASKAN KEMBALI keinginan mereka untuk memperkuat kerjasama antara kedua negara;

DIDORONG oleh keinginan untuk mempererat hubungan bersahabat yang telah terjalin dan untuk memajukan perluasan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara atas dasar prinsip persamaan, saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan;

MENGINGAT Persetujuan Perdagangan antara Republik Indonesia dan Republik Arab Mesir yang ditandatangani di Kairo tanggal 23 Juni 1977;

SESUAI DENGAN hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut :

**PASAL I
TUJUAN KERJASAMA**

Para Pihak akan berupaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan mempererat kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara yang akan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi yang saling menguntungkan dan untuk kesejahteraan rakyat masing-masing, sesuai prioritas-prioritas yang ditetapkan melalui kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi dan sosial masing-masing negara.

PASAL II AREA KERJASAMA

Para Pihak akan menjajaki dan merealisasikan kemungkinan kerjasama di bidang-bidang berikut:

1. Kerjasama di antara perusahaan-perusahaan di sektor umum dan sektor swasta kedua negara dalam mendirikan, mengimplementasikan dan mendorong usaha patungan dan investasi bersama di kedua negara;
2. Persiapan untuk implementasi usaha patungan dan investasi;
3. Pertukaran delegasi, tenaga-tenaga ahli dan peserta-peserta pelatihan di bidang-bidang yang disepakati oleh para Pihak;
4. Pertukaran informasi dan dokumen-dokumen teknis dalam bidang-bidang terkait;
5. Memfasilitasi pemberian beasiswa dalam bidang ekonomi dan teknik
6. Pertukaran pandangan mengenai riset-riset dan ujicoba di bidang ekonomi dan teknik serta transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Bidang-bidang kerjasama lain yang disepakati Para Pihak antara lain di bidang pertanian, energi, sumber daya alam, sumber daya manusia, farmasi dan perikanan.

PASAL III PIHAK YANG BERWENANG

Para Pihak melalui lembaga terkait akan menjamin pemenuhan persyaratan yang diperlukan bagi kerjasama ekonomi dan teknik dalam kerangka hukum dan peraturan yang berlaku di kedua negara.

PASAL IV PELAKSANAAN KERJASAMA

Kerjasama ekonomi dan teknik ini harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan para Pihak dan juga syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang disepakati oleh para Pihak. Ketentuan-ketentuan secara rinci yang berhubungan dengan bentuk-bentuk dan cara-cara serta syarat-syarat kerjasama di bidang yang telah disepakati harus ditetapkan dalam pengaturan-pengaturan pelaksanaan tersendiri.

PASAL V

HAL-HAL YANG TIDAK TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN

Dalam hal pengaturan-pengaturan, program-program atau proyek-proyek tertentu yang dilaksanakan atas dasar Persetujuan ini akan menghasilkan hal-hal yang tidak tercakup dalam Persetujuan ini, Para Pihak sepakat untuk membahas hal-hal tersebut dalam pengaturan terpisah sesuai dengan peraturan di masing-masing negara.

PASAL VI

PEMBENTUKAN KOMISI BERSAMA

1. Para Pihak sepakat untuk memanfaatkan Komisi Bersama yang dibentuk berdasarkan Pertukaran Nota tanggal 24 Juli 1985 yang terkait dengan Persetujuan Perdagangan yang ditandatangani tahun 1977, untuk memfasilitasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini;
2. Komisi Bersama akan dipimpin oleh Kementerian Kerjasama Internasional untuk Pihak Mesir dan Departemen Perdagangan untuk Pihak Indonesia. Sesi Komisi Bersama akan diadakan di Kairo dan Jakarta, dan agenda serta tanggal pelaksanaan sesi akan ditentukan tiga bulan sebelumnya melalui saluran diplomatik;
3. Komisi Bersama akan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Menjajaki kemungkinan-kemungkinan dan cara-cara bagi kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara, membahas langkah-langkah pelaksanaannya serta membuat keputusan-keputusan atas usulan yang relevan.
 - b. Secara reguler meninjau ulang pelaksanaan keputusan-keputusan Komisi Bersama dan protokol-protokol atau kontrak-kontrak dalam bidang ekonomi dan teknik yang disepakati antara organisasi-organisasi dan perusahaan-perusahaan terkait dari kedua pihak dan mendukung pelaksanaan efektif dari kerjasama tersebut.
 - c. Menguji langkah-langkah peningkatan hubungan di antara organisasi-organisasi dan perusahaan-perusahaan di bidang investasi di masing-masing negara.
4. Komisi Bersama ini jika diperlukan dapat membentuk panitia-panitia kecil atau kelompok-kelompok kerja untuk mencapai tujuan dari Komite Bersama melalui asosiasi penasihat dan ahli.

PASAL VII

DOKUMEN TEKNIS DAN PENGATURAN INFORMASI

Masing-masing Pihak menggunakan dokumentasi dan informasi teknis yang diterima dari Pihak lain hanya untuk tujuan yang disebutkan dalam Persetujuan ini dan tidak akan menyampaikannya kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pihak lain tersebut.

PASAL VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan atau perselisihan yang mungkin timbul dari penafsiran atau penerapan Persetujuan ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau negosiasi antara para Pihak.

PASAL IX

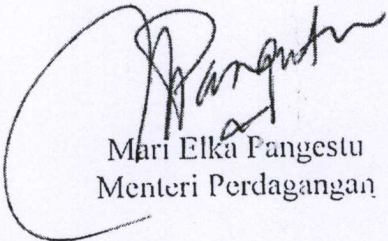
MASA BERLAKU, JANGKA WAKTU, AMANDEMEN DAN PENGAKHIRAN PERSETUJUAN

1. Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir di mana Para Pihak saling memberitahukan melalui saluran diplomatik, bahwa persyaratan hukum yang diperlukan bagi berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini tetap berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak mengakhiri Persetujuan ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, melalui saluran diplomatik.
3. Salah satu Pihak secara tertulis dapat mengajukan amandemen terhadap Persetujuan ini. Setiap amandemen yang telah disetujui oleh para pihak akan dibuat secara tertulis dan akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Persetujuan ini. Amandemen tersebut akan mulai berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal ini.
4. Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan masa berlaku setiap pengaturan-pengaturan, program-program atau proyek-proyek yang telah disepakati atas dasar Persetujuan ini hingga selesainya pengaturan-pengaturan, program-program dan proyek-proyek tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

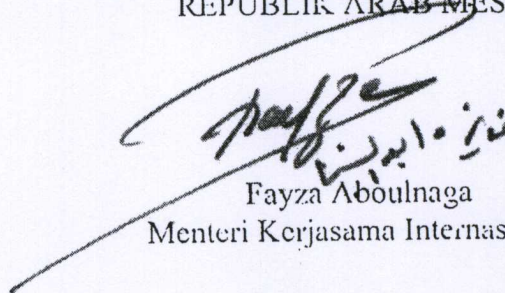
DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal 4 April 2007 dalam bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan mengenai penafsiran atas Persetujuan ini, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang akan berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA



Mari Elka Pangestu
Menteri Perdagangan

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK ARAB MESIR



Fayza Aboulnaga
Menteri Kerjasama Internasional

اتفاق
بين
حكومة جمهورية إندونيسيا
وحكومة جمهورية مصر العربية

بشأن
التعاون الاقتصادي والفني

أن حكومة جمهورية إندونيسيا و حكومة جمهورية مصر العربية (المشار إليهما فيما بعد بعبارة "الطرفان المتعاقدان")؛

رغبة منهما في توسيع وتعزيز علاقتهما الثنائية في المجالات الاقتصادية والفنية على المدى البعيد؛

واقناعا منهما بالحاجة إلى وجود تعاون فعال بينهما على المدى البعيد لمصلحة كلا الدولتين.

وإدراكا لأهمية إنشاء آلية لمُتَابَعَة مشروعات ومقترحات التعاون التي يتفق عليها بين الدولتين.

وثاكيدا لاهتمامهما بتدعيم التعاون بين الدولتين.

واسترشادا بالرغبة في تدعيم علاقات الصداقة القائمة بينهما وتشجيع التوسع في التعاون الاقتصادي والفني بين الدولتين استنادا إلى مبادئ المساواة، والمنفعة المتبادلة، واحترام سيادتهما.

وبالنظر إلى اتفاقية التعاون التجاري الموقعة بالقاهرة في 23 يونيو 1977 بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة جمهورية إندونيسيا، وطبقا للقوانين واللوائح السائدة في كلا البلدين،

اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى
أهداف التعاون

يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة الوسائل اللازمة لتشجيع وتدعيم التعاون الاقتصادي والفني بين الدولتين، والتي يمكن أن تسهم في تطوير الاقتصاد تحقيقا لمنفعتهما المتبادلة طبقا للأولويات التي تحددها سياسات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل منهما.

المادة الثانية مجالات التعاون

يقوم الطرفان المتعاقدان باستكشاف وتنفيذ كافة إمكانات التعاون الاقتصادي والفني في المجالات التالية :

- (1) التعاون بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص في كلا الدولتين لإقامة , تنفيذ , وتشجيع المشروعات المشتركة، والاستثمار المتبادلة في كلا الدولتين.
- (2) الأعمال التحضيرية لتنفيذ المشروعات المشتركة والاستثمارات.
- (3) تبادل الوفود ، وكذا الخبراء والمتدربين في المجالات التي يتفق عليها كلا الدولتين.
- (4) تبادل المعلومات والوثائق الفنية في المجالات ذات الصلة.
- (5) تسهيل تقديم منح دراسية في المجالات الاقتصادية والفنية.
- (6) تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالأبحاث الاقتصادية والفنية والأعمال التجريبية ونقل العلوم والتكنولوجيا.
- (7) أي مجالات تعاون آخر يتم الاتفاق المتبادل عليه بين الطرفين المتعاقدين ، مثل مجالات الزراعة ، والطاقة ، والموارد الطبيعية، والموارد البشرية، والمنتجات الدوائية ، والثروة السمكية.

المادة الثالثة السلطات المختصة

يضمن الطرفان المتعاقدان من خلال الهيئات المعنية إتمام المتطلبات اللازمة للتعاون الاقتصادي والفني كما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق ، في إطار القوانين واللوائح المطبقة في الدولتين .

المادة الرابعة تنفيذ التعاون

يتم تنفيذ التعاون الاقتصادي والفني طبقا لإمكانات ومتطلبات الطرفين المعنيين بالإضافة إلى الأحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بينهما . ويتم صياغة

النصوص التفصيلية المتعلقة بأشكال و أساليب و شروط هذا التعاون في المجالات التي يتفق عليها في برامج تنفيذية منفصلة.

المادة الخامسة موضوعات غير مدرجة بالاتفاق

في حالة ما اذا نتج عن بعض الترتيبات او البرامج او المشروعات المنفذة بمقتضى هذا الإتفاق أية مسائل لم يغطيها الاتفاق الحالي ، يتفق الطرفان المتعاقدان على مناقشة هذه الترتيبات بصورة منفصلة لمعالجة هذه المسائل وفقا للتشريعات المنظمة لكلا الطرفين .

المادة السادسة إنشاء لجنة مشتركة

اتفق الطرفان المتعاقدان على إنشاء لجنة مشتركة بمقتضى الكتاب المتبادل الخاص باتفاق التجارة الموقع بتاريخ 24 إبريل 1985 المتعلق باتفاق التجارة الموقع عام 1977 لتسهيل تنفيذ الالتزام بهذا الإتفاق. ويرأس هذه اللجنة المشتركة عن الجانب المصري وزارة التعاون الدولي ، وعن الجانب الإندونيسي وزارة التجارة . وتعد دورات اللجنة المشتركة بالتناوب في كل من القاهرة وجاكرتا ، ويتم الاتفاق على جدول الاعمال وتحديد المواعيد المناسبة لعقد الدورات قبل انعقادها بثلاثة أشهر عن طريق القنوات الدبلوماسية.

تقوم اللجنة المشتركة بإنجاز المهام التالية:-

- 1- استكشاف إمكانيات وسبل التعاون الاقتصادي والفنى بين الدولتين، والتفاوض بشأن إجراءات تنفيذها واتخاذ القرارات للمقترحات المتعلقة بها.
- 2- المراجعة الدورية لتنفيذ قرارات اللجنة المشتركة والبروتوكولات أو العقود المبرمة في المجالات الاقتصادية والفنية ، بين الهيئات والمؤسسات المختصة لكلا الطرفين، ودعم فاعلية تنفيذها.
- 3- بحث وسائل تطوير العلاقات بين الهيئات المختصة والمشروعات الاستثمارية في كل دولة.
- 4- يجوز للجنة المشتركة أن تنشئ لجانا فرعية أو مجموعات عمل لإتمام أهداف اللجنة المشتركة بالاستعانة بمستشارين وخبراء آخرين عند الحاجة.

المادة السابعة الوثائق الفنية والترتيبات الخاصة بالمعلومات

يستخدم كل طرف متعاقد الوثائق والمعلومات الفنية التي يتلقاها من الطرف الآخر في الأغراض المنصوص عليها فقط في هذا الاتفاق ، ولايفصح عنها لأي طرف ثالث ، دون الحصول على موافقة مسبقة من الطرف الآخر .

المادة الثامنة تسوية النزاع

يتم تسوية أى خلاف أو نزاع ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق نصوص هذا الاتفاق وديا ، من خلال التشاور او التفاوض بين الطرفين المتعاقدين .

المادة التاسعة دخول الاتفاق حيز النفاذ وسريانه ، وانقضائه

1- يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ آخر إخطار كتابي من أحد الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية ، يفيد بإتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة لدخوله حيز النفاذ .

2- يظل هذا الاتفاق سارى المفعول لمدة عشر سنوات، ويجدد تلقائيا لفترات لاحقة مدة كل منها خمس سنوات، ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بإخطار كتابي من خلال القنوات الدبلوماسية برغبته فى إنهاء الاتفاق، قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء تلك الفترة.

3- يجوز أن يطلب أي من الطرفين المتعاقدين كتابة تعديل هذا الاتفاق، على أن يصاغ أى تعديل يتفق عليه الطرفان المتعاقدان كتابة، ويصبح جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ من تاريخ الإتفاق المتبادل بين الطرفين المتعاقدين.

4- لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على أية مشروعات أو ترتيبات أو برامج قائمة بموجبه حتى الانتهاء من تلك المشروعات أو الترتيبات أو البرامج.

وإشهادا على ذلك فإن الطرفين الموقعين حيث فوضا من جانب حكومتهما , قد وقعا على هذا الاتفاق.

حرر هذا الاتفاق من أصلين في جاكرتا يوم 4 إبريل سنة 2007 باللغات العربية والإندونيسية والإنجليزية ، ولكل منها ذات الحجية .

عن

حكومة جمهورية مصر العربية

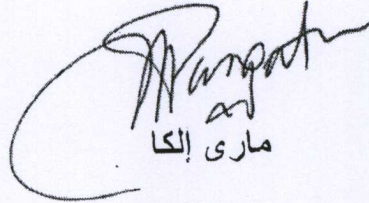
نزهة ابدلسا

فايزة أبو النجا

وزيرة التعاون الدولي

عن

حكومة جمهورية إندونيسيا



مارى إلكا

وزيرة التجارة

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT
ON
ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Arab Republic of Egypt hereinafter referred to as the two Contracting Parties;

DESIROUS of expanding and enhancing their bilateral relations in economic and technical areas on a lasting and long-term basis;

CONVINCED of the need for long-lasting effective cooperation in the interest of both countries;

CONSIDERING the importance of establishing a mechanism to follow up the agreed upon projects and proposals of cooperation between the two countries;

CONFIRMING their interest to strengthen cooperation between the two countries;

GUIDED by the desire to strengthen the existing friendly relations and to promote the expansion of economic and technical cooperation between the two countries based on the principles of equality, mutual benefit and respect for their sovereignty;

RECALLING the Trade Agreement between the Republic of Indonesia and the Arab Republic of Egypt signed in Cairo on 23rd June 1977;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE I OBJECTIVES OF COOPERATION

The two Contracting Parties shall take all necessary measures to promote and strengthen the economic and technical cooperation between the two countries that would contribute to the development of the economy for their mutual benefit and the welfare of their respective peoples in accordance with the priorities established by their economical and social development policies and strategies.

ARTICLE II AREAS OF COOPERATION

The two Contracting Parties shall explore and realize possibilities for economic and technical cooperation in the following fields:

1. Cooperation among companies of public work sector and private sector of both countries in establishing, implementing and encouraging joint ventures and mutual investment in both countries;
2. Preparatory work for the implementation of joint ventures and investment;
3. Exchange of delegations as well as experts and trainees in areas agreed upon by the two Contracting Parties;
4. Exchange of information and technical documents in related fields;
5. Facilitate in granting scholarship in economic and technical fields;
6. Exchange of views on economic and technical researches and experimental work and transfer of science and technology;
7. Any other cooperation as may be mutually agreed upon by the two Contracting Parties such as agriculture, energy, natural resources, human resources, pharmaceutical and fisheries.

ARTICLE III COMPETENT AUTHORITIES

The two Contracting Parties shall ensure through the relevant organizations, the fulfillment of the requirements needed for the economic and technical cooperation within the framework of laws and regulations in force in both countries.

ARTICLE IV IMPLEMENTATION OF COOPERATION

The economic and technical cooperation shall be conducted in accordance with the capabilities and requirements of the two Contracting Parties as well as with the terms and conditions to be agreed upon between the two Contracting Parties. The detailed provisions relating to the forms and methods as well as to the conditions of such cooperation in the agreed areas shall be laid down in separate implementing arrangements.

ARTICLE V ISSUES NOT COVERED BY THE AGREEMENT

In case specific arrangements, programs or projects, implemented under this Agreement may result in issues that are not covered in the present Agreement, the two Contracting Parties agree to discuss such issues in separate arrangements in accordance with their respective legislations.

ARTICLE VI ESTABLISHMENT OF A JOINT COMMISSION

1. The two Contracting Parties agree to employ the Joint Commission established under the Exchange of Notes dated 24th July 1985 related to the Trade Agreement signed in 1977 to facilitate the implementation of the Provision of this Agreement.
2. The said Joint Commission presided by the Ministry of International Cooperation for the Egyptian side and the Ministry of Trade for the Indonesian side. The sessions of the Joint Commission will be held in Cairo and Jakarta, and the agenda and convincing dates of the sessions will be fixed three months in advance through the diplomatic channels.
3. The Joint Commission shall fulfill the following functions:
 - a. To explore the possibilities and ways for the economic and technical cooperation between the two countries, deliberate on the measures for its implementation and make decision on relevant proposals.
 - b. To regularly review the implementation of the decisions of the joint commission and the protocols or contracts in the economic and technical

fields concluded between the relevant organizations and corporations of both parties and promote their effective implementation.

- c. To examine means of fostering relations among relevant organizations and investment enterprises of each country.
4. The Joint Commission may establish sub-committee or working groups to fulfill the aims of the Joint Committee by the association of other advisers and experts if needed

ARTICLE VII

TECHNICAL DOCUMENTS AND INFORMATION ARRANGEMENTS

Each Contracting Party uses the technical documentation and information received from other Contracting Party only for the purposes specified in this Agreement and shall not disclose them to any third party without the prior consent of the other Contracting Party.

ARTICLE VIII

SETTLEMENT OF DISPUTE

Any difference or dispute that may arise out from the interpretation or application of the provisions of this Agreement shall be settled amicably through consultation or negotiation between the two Contracting Parties.

ARTICLE IX

ENTRY INTO FORCE, DURATION, AMENDMENT AND TERMINATION

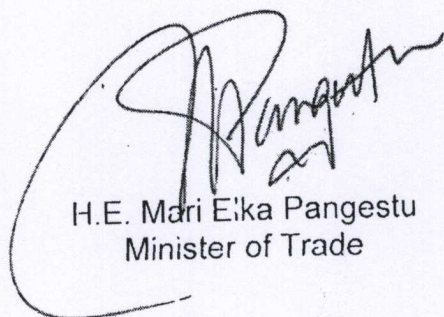
1. This Agreement shall come into force on the date of the last written notification by which the two Contracting Parties inform each other through diplomatic channels, that the legal requirements necessary for its entry into force have been fulfilled.
2. The Agreement shall remain in force for a period of 10 (ten) years and shall be automatically remain extended for subsequent periods of 5 (five) year each, unless either Contracting Party terminates it by giving written notification to either Contracting Party at least 6 (six) months in advance of its termination, through diplomatic channels.

3. Either Contracting Party may request in writing amendment of this Agreement. Any such amendment agreed upon by the two Contracting Parties shall be made in writing and it shall become an integral part of this Agreement. Such amendment shall enter into force as specified in this Article.
4. The termination of this Agreement shall not affect the validity and duration of any arrangements, programs, or projects agreed upon in conformity with this Agreement until the completion of those arrangements, programs or projects.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

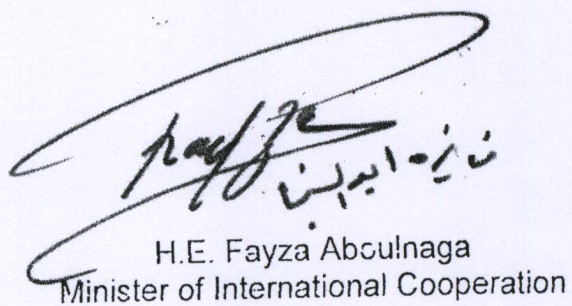
DONE in duplicate in Jakarta on this fourth day of April in the year two thousand and seven, in the Indonesian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA



H.E. Mari Eika Pangestu
Minister of Trade

FOR THE GOVERNMENT
OF THE
ARAB REPUBLIC OF EGYPT



H.E. Fayza Abculnaga
Minister of International Cooperation